

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Good Governance* di Desa Babakan Peuteuy adalah :

1. Tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara Pemerintah Desa Babakan Peuteuy dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik.
2. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan bagaimana sikap masyarakat setempat. Dengan adanya ruang publik yang disediakan untuk masyarakat ini akan menjadikan masyarakat lebih mempercayai program atau informasi yang diberikan aparatur Desa Babakan Peuteuy.
3. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban tugas Pemerintah Desa Babakan Peuteuy dilaksanakan dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Babakan Peuteuy kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib

mempertanggungjawabkan kegiatannya. Pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontak sosial yang dibuatnya dengan masyarakat Desa Babakan Peuteuy.

4. Konsep *value for money* di Desa Babakan Peuteuy dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, dan dapat meningkatkan mutu pelayanan serta dapat terwujud seiring dengan perkembangan *value for money* itu sendiri, dan begitupun sebaliknya apabila *value for money* tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan peneliti, yaitu:

1. Peranan *Good Governance* harus membangun keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat umum.
2. Edukasi rakyat agar mengetahui secara jelas tentang Peranan *Good Governance* di Pemerintah Desa Babakan Peuteuy
3. Tingkatkan kompetensi perangkat desa.
4. Desainlah pola partisipasi masyarakat desa agar lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku:

- Azlim, D., & Bakar, U. A. (2012). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Akutansi* ISSN, 2302, 164.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2014). *Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan*. *Jurnal akuntansi universitas jember*, 12(2).
- Cahyadi, A. (2016). *PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(02).
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Elahi, K. Q. I. (2009). *UNDP on good governance*. *International Journal of Social Economics*.
- Haris, O. K. (2015). *Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan*. *Yuridika*, 30(1), 58-83.
- Heriyanto, A. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Heryana, T., & Dewi, S. K. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur*.”.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). *Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges*. In *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Mustafa, M. (2017). *Democratic decentralisation and good governance: the political economy of procurement reform in decentralised Indonesia (Doctoral dissertation)*.

- Putra, H. S. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Rasul, S. (2009). *Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Rewansyah, A. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. *Yusaintanas Prima*.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Edy Sujana, S. E. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-470.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). *Analisis Penerapan GOOD GOVERNANCE dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah*. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49-59.
- Siringoringo, W. (2015). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi)*. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207-224.
- Tomuka, S. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. *Jurnal Politico*, 2(2).
- Usman, U., Sunandar, S., & Farida, I. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi AkruaI pada Entitas Pemerintah Daerah*. *Journal of Accounting and Investment*, 15(2), 101-113.
- Zeyn, E. (2014). *Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan*. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52-62.

### **Jurnal – Jurnal:**

Setyadihaja, R., Kurniasih, D., Nursnaeny, P. S., & Nengsih, N. S. (2017). *Good governance vs. sound governance: A comparative theoretical analysis. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. In *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017), Paris, France: Atlantis press.*

Kurniasih, D., Amin, M. A. S., & Karniawati, N. (2017). *Penyusunan roadmap reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance di Kota Bandung. Jurnal Transformative*, 3(1), 66-84.

### **Dokumen – Dokumen:**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 *tentang Good Governance*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) *Tentang Pelayanan Publik*

### **Rujukan Elektronik :**

(<https://www.usaid.gov>)

(<https://www.praxisframework.org/id/knowledge/governance>)

(<https://egovernmentindonesia.wordpress.com>)

(<https://www.bsn.go.id>)

(<https://www.bappenas.go.id>)